

Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas

Eka Putra B Santoso
Gorontalo Research Center (GRC)
23ekaputra@gmail.com

Abstract

The relationship between politics and religion in Indonesia at this time can be seen from one important thing that is being popularly known, namely politics of identity. Politics of identity is the main spotlight in politics in Indonesia, especially in mainstream and non-mainstream media such as social media. The word politics of identity today can be said to have the same "bad image" as the word politics itself. Especially in Indonesia. Disclosure of certain identities in society in referring to politics seems to be a total mistake and can even be called a grave sin. Like the election of contestants in direct elections based on religion, certain tribes or races become a big disgrace, especially in the midst of the strengthening of Pancasila as an ideology and national identity that should not strengthen at certain times. Remembering Indonesia, which "he said" had agreed with Pancasila. But the phrase politics of identity cannot be denied any more amid the dynamics of current political contestation, with its image as the "big enemy" of the current Pancasila and the main disease of democracy. How is the true identity politics in Indonesia until now, which is said to have strengthened and threatened the integrity of the Unitary Republic of Indonesia? This paper tries to trace the political roots of identity and its development to this day.

Keywords: *politics of identity, election, political contest*

Abstrak

Relasi politik dan agama di Indonesia saat ini bisa dilihat dari satu hal penting yang tengah populer istilahnya, yaitu politik identitas. Politik identitas tengah menjadi sorotan utama dalam politik di Indonesia, terutama di media-media mainstream maupun non-mainstream seperti media sosial. Kata politik identitas saat ini bisa dibilang memiliki "image" yang sama buruknya dengan kata politik itu sendiri, terutama di Indonesia. Pengungkapan identitas tertentu di masyarakat dalam bereferensi politik seolah menjadi salah total dan bahkan bisa dibilang dosa besar. Seperti pemilihan kontestan dalam pemilihan langsung yang berbasis pada agama, suku atau ras tertentu menjadi aib besar, apalagi di tengah menguatnya Pancasila sebagai ideologi dan identitas bangsa yang harusnya tidak menguat di saat-saat tertentu saja. Mengingat Indonesia yang "katanya" sudah sepakat dengan Pancasila. Namun frase politik identitas sudah tidak bisa ditolak lagi di tengah dinamika kontestasi politik sekarang, dengan image sebagai "musuh besar" Pancasila saat ini dan penyakit utama demokrasi. Bagaimana sejatinya politik identitas di Indonesia dulu hingga sekarang ini yang disebut kembali menguat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tulisan ini mencoba menelisik akar politik identitas dan perkembangannya hingga hari ini.

Kata Kunci: *politik identitas, pemilihan umum, kontestasi politik*

Pendahuluan

Pembumian nilai Pancasila memang harus menjadi proyek kebangsaan kita hari ini. Oleh karena sebuah sirkulasi politik yang tengah dilanda badai meruncingnya wacana identitas primordialistik. Landasan ini jelas berbeda dengan identitas keindonesiaan kita sewaktu sama-sama melawan penjajahan, kali ini politik identitas tengah menyisir sentimen suku agama, dan ras tertentu. Fenomena yang lagi populer ini terinfiltrasi pada arus pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Euphorianya pun seakan menjadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi di negeri ini. Dalam hal partisipasi, memang model pemilihan seperti sekarang ini menjadi sarana yang paling efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tetapi, konstruksi ini selalu menjadi masalah ketika pesta demokrasi tersebut bersentuhan dengan konflik-konflik horizontal yang malah membuat instabilitas daerah. Tentu banyak contoh kasus yang bisa disajikan perihal konflik politik tersebut. Konflik yang mengubah pesta demokrasi menjadi bencana demokrasi yang parah. Stepi Anriani mengambil data pada Sistem Nasional Pemantauan Kekekrasan (SNPK) dan The Habibie Center (THC) menemukan 9 dari 13 Provinsi terdapat 585 insiden kekerasan terkait pemilukada dengan dampak 47 tewas, 510 cedera dan 416 bangunan rusak. Dalam kalsifikasi wilayah, Aceh menjadi daerah yang merupakan daerah yang paling banyak terjadi insiden kekerasan, persentasinya pun sampai 53,7%, diikuti dengan NTB (12,3%), Papua (8,6%) dan insiden lainnya terdapat pada 9 Provinsi (23,%) (Anriani, 2018, hal.103). Menurut Stepi, kekerasan yang terjadi akibat Pilkada semacam di Aceh dikarenakan kondisi transisi pasca konflik seperti persaingan antara mantan GAM yang ingin maju menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif. Beberapa konflik politik yang ditengarai oleh sebuah system demokrasi lokal ini terjadi pula di Poso Sulawesi Tengah. Disertasi Hasrulllah di Universitas Indonesia mengurai secara gamblang terkait pemantik api yang menyebabkan konflik antar agama di Poso. Pada tesis tersebut mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Hasrullah, 2009) mengatakan dalam pengantarnya bahwa, konflik politik ditengarai adanya sebuah bola salju trjadinya konflik politik antar pasangan calon Bupati yang merembes pada sentiment agama sehingga menyebabkan korban kurang lebih 2000 jiwa.

Hal yang paling dekat kita lihat adalah dinamika Pilkada Jakarta yang membuka kotak pandora sentiment agama dan melibatkan masa (BBC News Indonesia, 2017) yang antusias menuntut salah satu calon Gubernur dalam hal ini Basuki Cahya Purnama (Ahok) dihukum karena dianggap menistakan agama atas pernyataannya di pulau seribu. Sampai-sampai efek dari fenomena tersebut terbawa pada Pilpres 2019. Bangsa ini seakan terbelah menjadi dua kubu, bahkan istilah binatang seperti cebong dan kampret menghiasi pergolatan politik nasional tersebut.

Konsepsi ini kedepan akan menjadi contoh atas pergolakan masa depan politik lokal, oleh karena menurut Prof Salim Said, peristiwa Pilkada Jakarta membuka kotak pandora sentiment agama ataupun suku dan etnis dan bisa saja menjadi trigger pemantik konflik -konfli politik dan menjalar pada permasalahan agama, etnis dan ras.

Beberapa contoh diatas perlu dianalisis secara mendalam apakah tantangan dari Pemilu dan Pilkada yang langsung ini salah dalam penerapannya ataukan memang kesalahan tidak terletak pada system yang ada melainkan pada polarisasi komunikasi Politik elit yang cenderung tidak memikirkan efek kulturasi yang akan dihasilkan dari steatmennya di panggung-panggung kampanye. Hal ini akan penulis liat dari pendekatan fenomenologi dan dibedah berdasarkan teori politik identitas yang kini menjadi sebuah ilustrasi kekinian dalam hal wacana pemilu dan pilkada di negeri ini. Kita tentu banyak mendengar istilah putra daerah dalam setiap pergolakan politik lokal, atau kebijakan perda syariah yang dibuat karena dianggap sebagai bentuk akomodasi mayoritas masyarakat atas nama agama. Hal ini tentu tidak salah sama sekali, tetapi apakah bentuk -bentuk seperti ini telah menampilkan sebuah kesetaraan dan keadilan secara umum. Semacam istilah putra daerah, yang tak tahu ukuran dari simbol tersebut seperti apa, apakah dilihat dari marga, atau dari cantuman tempat lahir pada kartu tanda penduduk. Hal ini saja tidak menggambarkan sebuah definisi yang jelas, bahkan multitafsir dan terindikasi akan menyebabkan nepotisme dalam hal pengisian jabatan-jabatan publik.

Ironi demokrasi seperti ini menjadikan pertanyaan besar keberlangsungan masa depan bangsa ini. Demokrasi yang harusnya mampu untuk meningkatkan peradaban bangsa ini malah terjebak pada konflik yang diakibatkan pada surplus politik identitas yang memanas bahkan koruptif dan nepotis.

Dinamika Politik Identitas di Indonesia

Secara filosofis, Prof Teguh Prasetyo mengatakan bahwa filsafat dalam pemilu lebih pada kegiatan befikir dalam rangka menemukan rasionalitas atau penalaran terhadap pemilu yang didalamnya diisi oleh undang-undang sebagai bentuk dari jiwa bangsa (*volksgeits*) yang penuh kebijaksanaan (Prasetyo, 2018, hal.7). Dalam penjelasan tersebut terurai bahwa kebijaksanaan yang kini melekat sebagai induk output dari pemilu mengharuskan sebuah tatanan yang rasional dan jujur dalam hal pelaksanaannya. Konsepsi ini yang harusnya menjadi pegangan elit dalam hal komunikasi politik substansial di panggung-panggung politik negeri ini. Tetapi memang alur berfikir rasional yang harusnya membahas tentang pertumbuhan ekonomi, atau pembangunan budaya tidak terlihat hanya materi elit politik

didominasi pada sebuah ajang saling menghina, politik uang, dan singgungan yang tidak jarang menuju pada hal-hal yang berbau rasisme dan sentiment agama. Henk Schulte dan Gery van Klinken menjelaskan anomali demokrasi lokal (Anriani, 2018, hal. 101) pada pilkada di Indonesia, menurutnya Pilkada cenderung diwarnai primordial etnis, kekerabatan, tingginya pengaruh agama, dan peran elit lokal yang seperti raja. Begitupun dengan kajian dari Indodata Research Center pada 2010 yang menyimpulkan dominasi rasa kesukuan, agama, dan primordialisme. Pilkada pun hanya menguntungkan kalangan pebisnis seperti rental mobil, manajemen artis, media, percetakan. Tetapi memang tuaian penjelasan di atas tengah menjadi sebuah fakta bahwa kemajuan demokrasi Indonesia memenuhi sebuah benteng identitas yang terus bergerak dan menampilkan eksistensinya, oleh karena sebuah identitas tidak mungkin stagnan dalam ruang-ruang sosial hari ini. Olehnya Burhanudin Muhtadi dalam penjelasannya mengatakan bahwa Demokrasi di Indonesia mengalami peremajaan, oleh karena mampu melahirkan regenerasi politik baru, walaupun kemudian latar elit yang masih tersandera dengan pola oligarki dan primordialis (ILC, 2018). Tetapi, pilkada Indonesia mampu melahirkan orang-orang seperti Jokowi yang hari ini menjadi Presiden RI, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, Ridwan Kamil, yang nantinya akan bermetamorfosis pada jenjang karir politik yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Malaysia yang masih saja berputar-putar pada elit lama seperti Mahatir Muhammad, Anwar Ibrahim dan Najib Rajak. Kemajuan ini bukan berarti tidak ada tantangan, biasanya memang sandungan tersebut diakibatkan perebutan dominasi antar partai politik dan elit dikalangan lokal. Hal ini oleh karena kue kekuasaan yang lama tersentralisasi. Olehnya identitas yang ada di setiap daerah menguat dengan adanya undang-undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kini berubah menjadi undang-undang 23 tahun 2014.

Kekuatan identitas ini dalam pandangan Agnes Heller dimaknai dengan strategi politik pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial (Rozi dkk, 2019, hal 3). Menurutnya politik identitas mampu memunculkan toleransi dan kebebasan, namun juga memunculkan pola yang destruktif, kekerasan verbal dan pertentangan etnik. Dua arus yang mempunyai definisi ganda ini menampilkan sebuah politik identitas tidak melulu menjadi momok yang buruk bagi kelangsungan demokrasi, karena politik Identitas juga bekerja tidak hanya pada kontestasi pemilu tetapi juga bekerja pada ruang-ruang sosial dan hal itu memunculkan sebuah rasa gotong royong dan toleransi antar sesama. Tetapi ranah politik identitas lebih menonjol dan dibaca dalam hal dominasi dan kontestasi politik. Olehnya kemudian mewujudkan demokrasi yang substantif dalam hal ini kesejahteraan dan keadilan belum mampu diwujudkan oleh elit politik karena terjebak pada polarisasi komunikasi yang stagnan pada permasalahan identitas. Jalan terjal ini dalam pola politik lokal harus dihadapi secara matang, eksistensi kultural yang menjelma sebagai identitas harus menjadi

pegangan pemersatu dan tidak digunakan dalam slebaran pemenangan politik yang tidak dapat membuat sebuah kenaikan taraf pendidikan pemilih.

Berikutnya instrument yang seharusnya mengikat dan mengolah politik identitas ini adalah partai politik, tingkat kepercayaan raykat yang terus menurun pada insitusi demokrasi ini harusnya diolah menjadi semacam branding baru untuk lebih substantif dalam hal kampanye, program dan ideologisasi dalam mengisi ceramah dan komunikasi politik. Agar kemudian stigma negatife pada parpol mampu untuk diredam secara berkala. Tetapi memang gerakan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama dan serius melaksanakannya. Konsep ini sangat penting oleh karena akan membantu polarisasi politik lokal pada tataran yang stabil dalam hal mengelola politik identitas yang kini meruyak. Kemudian, agregasi dari hal tersebut jelas akan sulit ditanggunggi oleh kelompok revivalis yang biasanya menumpang emosi umat ketika pekikan politik identitas di suarakan di ruang-ruang publik.

Penutup

Pemilu dan Pilkada secara langsung adalah kemajuan bangsa ini dalam berdemokrasi, oleh karena selama 32 tahun suara rakyat dibelenggu dengan otoritarianisme dalam kekuasaan, tetapi pula tantangan kedepan bukan makin sedikit tetapi justru makin banyak. Olehnya dalam hal tersebut politik identitas menjadi salah satu batu terjal terselengganya sebuah system pemilu dan pilkada di Indoensia. Ketika kita menelisik lebih jauh nestapa tersebut harus dikontrol dan di formulasikan secara baik dalam hal pengaturan system partai politik yang kini merosot tajam dalam hal kepercayaan public. Semua pasti bersepakat bahwa tidak ada system yang sempurna, pasti ada kekurangan tetapi yang paling penting bagaimana meminimalisir kekurangan tersebut. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki badan pengawasan pemilihan umum (BAWASLU) yang punya tugas cukup berat sebagai lembaga yang ditugaskan menuntaskan kejahatan tindak pidana pemilu. Pengaturan ini menjadi langkah maju walaupun juga eksistensi kultural tidak mampu di jangkau oleh lembaga ini. Yang paling penting adalah mampu untuk mengelola partai politik dalam hal reformasi system yang kini tertanam dan menjadi episentrum tajamnya identitas.

Daftar Pustaka

- Rozi, dkk. (2019). *Politik Identitas, Problematika dan Paradigma solusi keetnisan versus keindonesiaan*. Jakarta Timur. Bumi Askara.
- Hasrullah. (2009). *Dendam Konflik Poso periode 1998-2001, konflik Poso dari perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- ILC. (2018). Peta Politik Pilkada Menurut Burhanudin Muhtadi. diakses 16 Desember 2019, dari https://www.youtube.com/watch?v=TcE1_7mVXkA,
- BBC News Indonesia. (2017). Aksi 212: Rizieq Shihab datang dan menyeru 'penjarakan Ahok'. BBC News Indonesia. diakses 16 December 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39035135>
- Anriani, S. (2018). *Intelijen dan Pilkada (Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu)*.
- Prasetyo, T. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung. Nusa Media.